



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1393 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan penyesuaian ketentuan dalam *road map* reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Road Map Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



PENAJAMAN
ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI
2023 - 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	1
B. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU	2
BAB 2 GAMBARAN BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM	3
A. Kondisi <i>Eksisting</i> Reformasi Birokrasi KPU	3
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	3
2. Target Kinerja Sasaran Strategis RB dan Capaian KPU	4
B. Capaian Reformasi Birokrasi Dalam Renstra KPU.....	7
1. Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.....	7
2. Kegiatan Utama dan Indikator – Indikator Reformasi Birokrasi	20
BAB 3 AGENDA REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	26
A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.....	26
B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General KPU.....	27
1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama.....	27
2. Penetapan Target Kegiatan Utama	31
3. Penetapan dan Target Reformasi Birokrasi Tematik	37
BAB 4 MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPU.....	39
A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU	39
1. Rencana Aksi RB General	40
2. Rencana Aksi RB Tematik	65
B. Pelaksana Reformasi Birokrasi KPU	68
C. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi RB KPU.....	71
BAB 5 PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Reformasi Birokrasi KPU	3
Tabel 2 Target Kinerja Tujuan RB dan Capaian KPU	4
Tabel 3 Penjabaran Indeks RB KPU 2020-2021	4
Tabel 4 Indikator Hasil Antara dan Penajaman Roadmap 2024 serta Capaian KPU	5
Tabel 5 Sasaran Strategis 3 Renstra KPU-Tahun 2022	8
Tabel 6 Unit Kerja Yang Memperoleh ISO 9001:2015.....	10
Tabel 7 Indikator Hasil Antara dan Penajaman Roadmap 2024 serta Capaian KPU	20
Tabel 8 Capaian Hasil Antara KPU 2020-2021	24
Tabel 9 Penajaman Road Map RB 2020-2024	26
Tabel 10 Rincian Indikator dan Baseline RB 2020-2024	26
Tabel 11 Prioritas Kegiatan Utama RB General.....	28
Tabel 12 Sasaran Strategis 1	31
Tabel 13 Target Kegiatan Utama Sasaran Strategis 2	35
Tabel 14 Penetapan Tema dan Target RB Tematik	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penetapan Pilot Project 34 KPU Provinsi	9
Gambar 2 Sertifikat ISO KPU	10
Gambar 3 Piagam Penghargaan JDIHN	11
Gambar 4 Penghargaan Kearsipan tahun 2022	12
Gambar 5 Skor Survey Penilaian Integritas	13
Gambar 6 Anugerah Reksa Bandha Kementerian Keuangan	14
Gambar 7 Opini WTP	15
Gambar 8 Penghargaan dari Kementerian Keuangan.....	15
Gambar 9 Penghargaan Kinerja Anggaran	16
Gambar 10 Penghargaan Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.....	17
Gambar 11 Peringkat 4 BKN Award Kategori Pengembangan Kompetensi..	17
Gambar 12 Peringkat 5 BKN Award Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	18
Gambar 13 Pemenang Public Relations Indonesia Award 2023	19
Gambar 14 Penghargaan Badan publik Informatif.....	19
Gambar 15 5(lima) besar Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Publik Paling Tinggi	20
Gambar 16 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	39
Gambar 17 Tabel Rencana Aksi RB General	42
Gambar 18 Tabel Rencana Aksi RB Tematik	66
Gambar 19 Pelaksana RB Level Mikro	69

DAFTAR ISTILAH

ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
EDGI	E-Government Development Index
e-gov	<i>electronic government</i>
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIHN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPRBN	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PDN	Produk Dalam Negeri
RB	Reformasi Birokrasi
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SETJEN	Sekretariat Jenderal
SOP AP	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
SPBE	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
STU	<i>Strategic Transformation Unit</i>
TKDN	Tingkat Kandungan Dalam Negeri
WBK/WBBM	Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Upaya percepatan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tentunya membutuhkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) IV 2020-2024, tata kelola pemerintahan merupakan salah satu bagian dari pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Grand Design RB tahun 2010-2025, yang saat ini telah berada pada periode ketiga.

RB dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus guna mencapai visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yakni pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat. Setjen KPU terus berkomitmen dalam pelaksanaan RB secara kontekstual dan berkesinambungan. Berbagai capaian sejatinya telah diraih Setjen KPU, namun tentu masih diperlukan perbaikan secara terus menerus. Penyusunan Penajaman Roadmap RB Setjen KPU Tahun 2023-2024 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana kerja berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Penajaman program RB setelah terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 .

Pelaksanaan RB Setjen KPU pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis KPU sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024. Sehingga dapat dikatakan arah kebijakan RB menjadi strategi sekaligus akselerator dalam pencapaian visi dan misi KPU. Akhirnya, dengan berbagai program pembaharuan yang terus dikembangkan Setjen KPU, diharapkan semakin memantapkan langkah menuju birokrasi KPU berkelas dunia.

Jakarta, Oktober 2023

Ketua Tim RB Setjen KPU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setjen KPU telah melaksanakan Program RB sejak Tahun 2013 diawali dengan penyusunan *Road Map* RB sebagai acuan pelaksanaan RB di lingkungan Setjen KPU. Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih,” sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.” Penajaman tujuan dilakukan agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional serta mampu menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir. Isu utama tersebut diantaranya menciptakan tata Kelola pemerintahan yang mampu berkontribusi signifikan dalam Pembangunan Nasional serta mampu berdaya saing dengan negara lain, penguatan upaya pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta ASN yang lebih profesional. RB diharapkan tidak hanya penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan, namun juga isu hilir yaitu masalah yang ada di masyarakat dan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Setjen KPU yang dalam pelaksanaan RB Nasional berada pada level mikro mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada Setjen KPU. Terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan RB General Setjen KPU antara lain penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi internal. RB Tematik merupakan upaya untuk mengurai dan mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional. Setjen KPU merupakan salah satu instansi pemerintahan yang

bersifat *non-implementing agency*, sehingga program RB tematik yang akan dilaksanakan merupakan inisiasi secara mandiri berdasarkan tema yang ditetapkan oleh tingkat makro. Dari empat tema RB tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden), Setjen KPU mengambil dua tema, yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB pada Setjen KPU yang terpotret selama 5 (lima) tahun masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. Pergeseran kebijakan nasional yang selalu dinamis khususnya terkait perbaikan tata kelola pemerintahan membuat struktur *Road Map* RB Setjen KPU juga harus disesuaikan dengan kebijakan baru. Diharapkan dengan pendekatan kombinasi dari *Road Map* RB Setjen KPU 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan penajaman *Road Map* RB dapat melengkapi dan memperkaya khazanah *Road Map* RB Setjen KPU untuk dapat mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan *Road Map* RB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Program RB sejak Tahun 2012 dengan mengajukan Dokumen Usulan dan *Road Map* RB kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Selanjutnya pelaksanaan RB di lingkungan KPU mengacu pada *Road Map* RB KPU Tahun 2015-2019 dan *Road Map* RB KPU Tahun 2020-2024 yang hingga saat ini menjadi acuan.

Road Map RB KPU berisikan kegiatan di *level* mikro y yang mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai *Road Map* RB Nasional. *Road Map* RB KPU disusun oleh Tim RB di lingkungan Setjen KPU dan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana aksi RB di tingkat Setjen KPU, Biro, Pusat, dan Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menjadi dasar acuan bagi KPU untuk memperbaharui Keputusan KPU Nomor 612/OTT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* RB KPU Tahun 2020-2024. Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 yaitu sebagai berikut:

1. Substansi tujuan sasaran dan indikator keberhasilan;
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektoral dan lintas instansi (*cross cutting issue*)
3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang berfokus pada percepatan pencapaian tujuan dan penyelesaian terhadap akar masalah, serta isu prioritas.; dan

4. penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja sejenis.

B. Dasar Hukum RB di Lingkungan KPU

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dan operasional untuk pelaksanaan RB Tahun 2020-2024. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Penyusunan *Road Map* RB Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 mengacu dan diturunkan dari berbagai dokumen perencanaan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan juga dilandaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

BAB 2
GAMBARAN BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Kondisi Eksisting RB KPU

1. Pelaksanaan RB KPU

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Indikator kinerja tujuan RB Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks RB kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi); dan
- c. Capaian 3 (tiga) Indikator Daya Saing Global (contohnya adalah EDGI)

Dari ketiga Target Kinerja Capaian RB yang ditargetkan di atas, KPU memiliki keterkaitan erat dengan indikator pertama yaitu **“Capaian Indeks RB KPU”**, capaian tersebut dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Indeks Reformasi Birokrasi KPU

Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target 2024	Capaian KPU 2022
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Lembaga	100% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik	Sangat Baik (BB) Indeks 74.67

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/695/RB.06/2022, tanggal 6 Desember 2022, **Indeks Reformasi Birokrasi KPU tahun 2022 adalah 74,67** kategori **“BB”**. Indeks

tersebut naik sebesar 0,98 dari sebelumnya 73,69 Kategori “BB” di Tahun 2021.

Tabel 2 Target Kinerja Tujuan RB dan Capaian KPU



Indeks RB KPU tahun 2022 adalah 74,67 diperinci sebagai berikut:

Tabel 3 Penjabaran Indeks RB KPU 2020-2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020*	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20,00	12,37	12,89	14,44
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,60	7,60	6,63
3.	Reform	30,00	20,25	20,84	21,68
Total Komponen Pengungkit		60,00	40,22	41,33	42,75
No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020*	2021	2022
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,53	7,66	7,77
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,03	9,08	9,24
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,23	9,25	8,62
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,62	6,37	6,29
Total Komponen Hasil		40,00	31,41	32,36	31,92
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100,00	71,63	73,69	74,67

*)Surat Nomor B/32/M.RB.06/2022, Tanggal 7 Maret 2022

2. Target Kinerja Sasaran Strategis RB dan Capaian KPU

Terdapat 2 (dua) target kinerja pada sasaran strategis RB Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
- b. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAHLAK dengan ASN yang Profesional.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis tersebut memiliki “Baseline” dan “Target”, yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Indikator Hasil Antara dan Penajaman Roadmap 2024 serta Capaian KPU

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024	Capaian KPU 2022
1.	Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Kementerian/ lembaga: 53,26% Baik	100% Kementerian/ lembaga Baik 80%	27,73 “Baik”
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian/ lembaga: 93,75% Baik	100% kementerian/ lembaga minimal Baik	68,15 “Baik” “B”
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kementerian/ lembaga: 95%	100% kementerian/ lembaga WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024	Capaian KPU 2022
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian an PANRB)	6,90% (2022)	7,66%	N/A
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian an PANRB)□	60,9% (2022)	67,14%	N/A
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata Kementerian/ lembaga: 81,1%	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	86,24
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata Kementerian/	Nilai rata-rata kementerian/	92,40

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024	Capaian KPU 2022
		t (sumber Kementrian PANRB)	lembaga: 88,06	lembaga/ pemerintah daerah meningkat	

Pada Tahun 2022 KPU telah melaksanakan 5 (lima) indikator Sasaran Strategis RB yaitu:

- Indeks SPBE;
- Capaian Akuntabilitas Kinerja;
- Capaian Akuntabilitas Keuangan;
- Nilai Survei Penilaian Integritas; dan
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Dari 5 (lima) indikator tersebut tidak ada yang berada di bawah rata-rata yang menjadi “Baseline”. **Ke depan KPU perlu untuk menambahkan 2 (dua) indikator Sasaran Strategis RB yang belum memiliki hasil yaitu “Nilai Survei Employee Branding” dan “Nilai Survei Indeks BerAHLAK” yang keduanya dilakukan oleh Kementerian PANRB.**

B. Capaian RB Dalam Renstra KPU

1. Capaian Tujuan dan Sasaran RB

RB KPU merupakan “Sasaran Strategis” bagi KPU, pada Renstra KPU 2020-2024 RB ada pada “Sasaran Strategis ke Tiga” yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas”. Indeks RB yang di peroleh di tahun 2022 di angka 74,67 atau memperoleh capaian 95,73%. Beberapa komponen yang menjadi indikator Hasil RB di Renstra juga mengalami hasil yang positif. Naiknya “Indeks Akuntabilitas Kinerja” KPU dari 67,34 ke 68,15 mempertahankan predikat “B”, Opini “Wajar Tanpa

Pengecualian”(WTP) yang berhasil dicapai, dan capaian angka “Keterbukaan Informasi Publik” yang mencapai 98,68%.

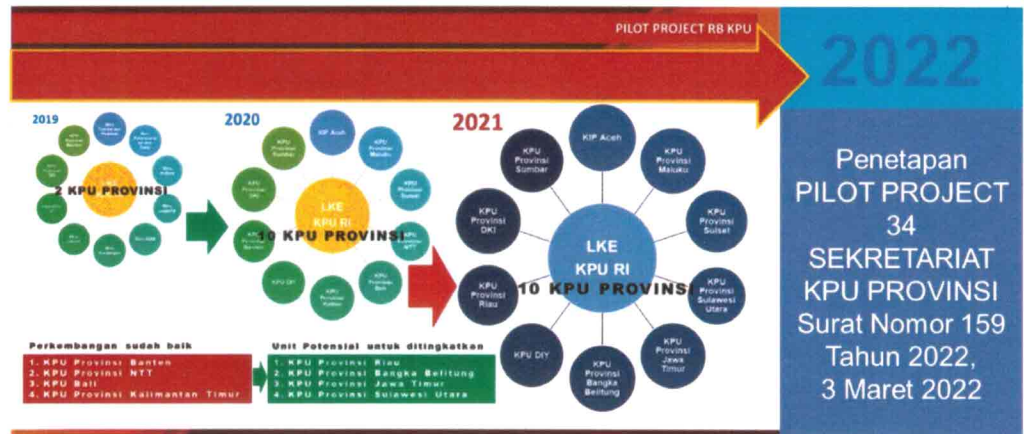
Tabel 5 Sasaran Strategis 3 Renstra KPU-Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	74,67	95,73%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	98,68%	98,68%

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan RB di KPU dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB di KPU dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2022, diantaranya:

1. Area Manajemen Perubahan, KPU melakukan perbaikan sektor pembangunan RB dengan mengembangkan 34 (tiga puluh empat) *Pilot Project* KPU Provinsi dari yang ditahun sebelumnya hanya 10 (sepuluh) Provinsi.



Gambar 1 Penetapan Pilot Project 34 KPU Provinsi

Perubahan metode sosialisasi ke metode *Training of Trainer* (TOT) dan dilakukan berjenjang mulai menghasilkan capaian. Dampak dari pembangunan dan perubahan strategi ini adalah semakin membaiknya pemahaman Pelaksanaan RB di Satuan Kerja KPU yang menjadi fokus rekomendasi perbaikan. Tercatat Pencanangan dan Pembangunan Kawasan Zona Integritas telah berhasil dibangun di:

- a. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur;
- b. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali;
- c. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Daerah Khusus Yogyakarta (DIY);
- e. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat;
- f. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Gorontalo;
- g. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah;
- h. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara;
- i. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi

Tengah; dan

- j. Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Sebagai perwujudan perubahan yang direncanakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, dibentuk agen perubahan dari Bapak/Ibu Kepala Biro yang mengkoordinir perubahan-perubahan untuk membuat efektivitas layanan KPU (seperti menetapkan standar ISO, Penyusunan Bisnis Proses, SOP, aplikasi layanan, Survei pelayanan, serta berbagi hal yang senantiasa mempermudah pelayanan dan mendekatkan diri dengan *stakeholder*.

Tabel 6 Unit Kerja Yang Memperoleh ISO 9001:2015

No	Unit Kerja	ISO 9001:2015	
		2001	2022
1.	Biro Logistik	√	
2.	Biro Perencanaan dan Organisasi		√
3.	Biro Sumber Daya Manusia		√
4.	Biro Teknis Penyelenggara Pemilu		√

Selain Unit kerja pada Tabel di atas Pusat Data dan Informasi KPU telah memperoleh Predikat **ISO 27001** di tahun 2022.



Gambar 2 Sertifikat ISO KPU

2. Area Deregulasi Kebijakan, KPU melakukan perbaikan penyusunan kebijakan dan deregulasi dengan penyusunan naskah akademik, uji publik dan menerapkan *Reaserch Impac Analysis* (RIA) yang menjadi rekomendasi evaluasi. Disamping itu pengelolaan JDIH KPU berusaha ditingkatkan dengan adanya *Bench-learning* ke Instansi yang memiliki pengelolaan JDIH terbaik. Adapun capaian JDIH KPU yaitu:
 - a. Mempertahankan Penghargaan JDIH terbaik untuk kategori Lembaga Non Struktural untuk ke 4 kalinya.
 - b. Hasil yang diperoleh adalah **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** KPU berada di angka 75,7 (BB) dan memperoleh apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Gambar 3 Piagam Penghargaan JDIHN

3. Area Kelembagaan KPU melakukan Evaluasi Kelembagaan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 20 Tahun 2018 dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali. **Indeks Evaluasi Kelembagaan** KPU di tahun 2022 memperoleh nilai **70,61** atau **“Efektif”** dalam satu rumpun Kementerian/Lembaga Bidang POLHUKAM. KPU melakukan penilaian mandiri di tahun 2022 dengan nilai 75,17 (Efektif).
4. Area Tatalaksana KPU telah menetapkan Bisnis Proses KPU dengan Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta

Proses Bisnis Di Lingkungan KPU, pada tanggal 11 Mei 2022. Proses bisnis tersebut mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Bisnis proses tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU. Hasil lain yang berhasil diperoleh oleh KPU di Tahun 2022 yaitu:

- a. Memperoleh predikat **“Informatif”** dari hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di tahun 2022
- b. Meningkatkan **Indeks SPBE KPU** di tahun 2022 dengan nilai sebesar **2,73** dengan predikat **“Baik”** dari sebelumnya di tahun 2021 dengan Indeks 2,16 predikat “Cukup” Tahun 2021.
- c. Mempertahankan indeks “Baik” dalam pengelolaan Arsip di tahun 2022.



Gambar 4 Penghargaan Kearsipan tahun 2022

5. Area Akuntabilitas Kinerja KPU kembali berupaya meningkatkan pengelolaan akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keuangan. KPU memperoleh penghargaan:
- Juara I Lelang Awards 2021 Kategori Lelang Non Eksekusi Wajib;
 - Juara II BMN Awards 2021 Kelompok III Kategori Utilisasi;
 - Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022
 - Juara III Kategori Utilisasi Barang Milik Negara
 - Juara II Kategori Pemohon Lelang Noneksekusi Wajib
 - Juara III Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara
 - Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022; dan
 - Piagam Penghargaan Kementerian Negara/Lembaga Pertama sebagai Pengelola Rekening Pemerintah dalam Bentuk Virtual Account (VA) untuk Jenis Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2023.



Gambar 5 Skor Survey Penilaian Integritas



Gambar 6 Anugerah Reksa Bandha Kementerian Keuangan

6. Area Pengawasan, pada Tahun 2022 KPU telah membangun Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan WBK. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pertama kali memperoleh predikat **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 7 Opini WTP



Gambar 8 Penghargaan dari Kementerian Keuaangan



Gambar 9 Penghargaan Kinerja Anggaran

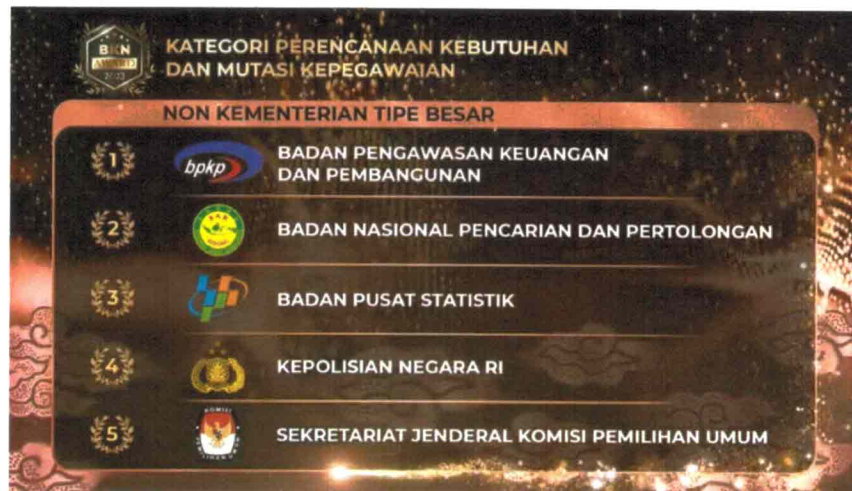
7. Area Peningkatan Kualitas SDM Aparatur KPU berhasil memperoleh Peringkat III pada BKN Award Tahun 2022 pada Kategori Implementasi Manajemen Kinerja Non Kementerian tipe Besar. Hal lainnya yang berhasil dilakukan pada area ini berupa:
 - a. Pengisian jabatan pada perubahan SOTK Tahun 2022;
 - b. Pembangunan Sistem Informasi Pegawai (Simpeg); dan
 - c. Pembangunan Sistem Informasi Badan AdHoc (SIKBA)



Gambar 10 Penghargaan Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja



Gambar 11 Peringkat 4 BKN Award Kategori Pengembangan Kompetensi



Gambar 12 Peringkat 5 BKN Award Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian

8. Area pelayanan publik KPU berhasil meningkatkan **Indeks Pelayanan Publik** di tahun 2022. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menetapkan KPU berada di posisi 34 (tiga puluh empat) dengan nilai **Indeks 4,34 (A-)** dari 81 (depan puluh satu) Kementrian/Lembaga yang dinilai. KPU diwakili oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dengan Layanan “Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan” (PDPB). Di tahun 2021 KPU berada di peringkat 48 (empat puluh delapan) dari 84 (delapan puluh empat) Kementerian/Lembaga dengan indeks 3,98 (B) yang saat itu diwakili oleh Biro Teknis Penyelenggara Pemilu untuk layanan Pendaftara Peserta Pemilihan Umum.



Gambar 13 Pemenang Public Relations Indonesia Award 2023



Gambar 14 Penhgargaan Badan publik Informatif



Gambar 15 5(lima) besar Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Publik Paling Tinggi

2. Kegiatan utama dan indikator – indikator RB

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 7 Indikator Hasil Antara dan Penajaman Roadmap 2024 serta Capaian KPU

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2021	Dalam Road Map 2020-2024 setelah Penajaman	Capaian KPU 2022
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan	N/A
Penataan Peraturan Perundang-	2. Indeks Reformasi Hukum	Sudah Tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan,	75,70

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2021	Dalam Road Map 2020-2024 setelah Penajaman	Capaian KPU 2022
Undangan/ Deregulasi Kebijakan			disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur	
	3. Indeks Kualitas Kebijakan			N/A
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum Tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5	N/A
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia	Indikator 5 dilanjutkan	2,73
	6. Indeks Pengawasan Arsip		Indikator 6 s.d. 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinegikan dengan indikator 5	61,13
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan			90,12
	8. Indeks Pengelolaan Aset			3,00
	9. Indeks Pemerintahan	Indikator 9 Tidak	Indikator 9 Tidak	N/A

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2021	Dalam Road Map 2020-2024 setelah Penajaman	Capaian KPU 2022
	Daerah	Tersedia	Dilanjutkan	
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10.Indeks Profesionalitas ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11	27,07 (2021)
	11.Indeks Sistem Merit			N/A
	12.Indeks Tata Kelola Manajemen ASN			N/A
Penguatan Akuntabilitas	13.Nilai SAKIP	Indikator 13 Sudah Tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan	68,15
	14.Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 14 Sudah Tersedia		N/A
Pengawasan	15.Maturitas SPIP	Indikator 15-19 Sudah Tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14	3
	16.Kapabilitas APIP (IACM)		Indikator 16 diintegrasikan dengan	3

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2021	Dalam Road Map 2020-2024 setelah Penajaman	Capaian KPU 2022
			indikator 15	
	17.Opini BPK		Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit	WTP
	18.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa		Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan disinergikan dengan Indikator 5	28,60
	19.Indeks Persepsi Anti Korupsi		Indikator 19 digantikan dengan Nilai Survei Penilaian Integritas	86,24
Pelayanan Publik	20.Indeks Pelayanan Publik	Indikator 20-22 Sudah Tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan	4,34
	21.Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik			N/A
	22.Survei		Indikator 22	92,40

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB Sebelum Penajaman	Kondisi Sampai 2021	Dalam Road Map 2020-2024 setelah Penajaman	Capaian KPU 2022
	Kepuasan Masyarakat		dilanjutkan, disempurnakan	

Perkembangan komponen “Hasil Antara” yang dicapai KPU dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Capaian Hasil Antara KPU 2020-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai		
			2020	2021	2022
1.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,00	2,50	3,00
2.	Implementasi SPBE	0-5	-	2,16	2,73
3.	Kualitas Pengelolaan PBJ	0-100	0	18,36	28,60
4.	Kinerja Pelaksana Anggaran	0-100	-	92,49	90,12
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,98	4,34
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	3
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2+	3
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	71,98	63,66	61,13
9.	Reformasi Hukum	0-100	Tidak Ada	Tidak Ada	75,70
10.	ASN Profesional	0-100	62,00	27,07	-
11.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	0-100	82, 33	Tidak Ada	Tidak Ada

Nilai “Hasil Antara” di tahun 2020 dengan 6 (enam) indeks,

sementara ditahun 2021 terdapat 9 (sembilan) Indeks dan di tahun 2022 Nilai Hasil antara terdapat 9 (sembilan) Indeks namun ada Indeks yang tidak masuk, yaitu “Indeks Profesionalitas ASN” dan digantikan dengan “Indeks Reformasi Hukum”.

KPU mengalami penurunan sub komponen “Hasil Antara” di dua disektor, yaitu:

1. Penilaian Kinerja Anggaran (Skala 100), turun dari 92,49 ke 90,12 (-2,37) ;dan
2. Kualitas Pengelolaan Arsip (Skala 100), turun dari 63,66 ke 61,13 (-2,53)

Terdapat Lima sub komponen “Hasil Antara” lainnya yang naik yaitu:

1. Pengelolaan Aset (Skala 0-4) naik sebesar 0,50 dari 2,5 ke 3,0
2. Implementasi SPBE (Skala 0-5) naik sebesar 0,57 dari 2,16 ke 2,73
3. Kualitas Pengelolaan PBJ (Skala 100) naik sebesar 10,24 dari 18,36 ke 28,60
4. Kualitas Pelayanan Publik (Skala 0-5) naik sebesar 0,36 dari 3,98 ke 4,34
5. Kapabilitas APIP (Skala 0-5) naik dari 2+ ke 3

BAB 3
AGENDA REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Tujuan Dan Sasaran RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Tabel 9 Penajaman Road Map RB 2020-2024

Sebelum Penajaman	Sesudah Penajaman
Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik

Tabel 10 Rincian Indikator dan Baseline RB 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2	Predikat SAKIP minimal B	96,40%	100%
	3	Opini BPK minimal WTP	94% (2018)	100%
Birokrasi yang kapabel	1	Indeks Kelembagaan Baik	n.a	100%
	2	Predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)	74%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		BASELINE 2019	TARGET 2024
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik Baik	59,52%	100%

B. Perencanaan RB General KPU

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* RB 2010–2025.

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Setelah dilakukan identifikasi, berikut adalah prioritas kegiatan

utama RB General di lingkungan Setjen KPU:

Tabel 11 Prioritas Kegiatan Utama RB General

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	10	10	10	30
2	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	8	8	26
3	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	5	25
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	4	10	24
5	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	3	10	23
6	Pelaksanaan Arsip Digital	10	3	10	23
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	6	7	23
8	Penguatan Pengelolaan	10	5	5	20

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
	Keuangan dan Aset				
9	Penataan Jabatan Keuangan	10	5	5	20
10	Penguatan Manajemen Talenta	10	5	5	20
11	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	5	5	20
12	Penguatan Sistem Merit	10	5	5	20
13	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	5	5	20
14	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	4	5	19
15	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	4	5	19
16	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	3	5	18
17	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	10	4	4	18

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
	Publik				
18	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	10	3	3	16
19	Penguatan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	10	3	3	16
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	1	3	14
21	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	0	0	10

Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Setelah mempertimbangkan isu strategis dan evaluasi terhadap pencapaian RB Setjen KPU, maka berikut adalah rencana aksi pelaksanaa Reformasi Birokrasi 2023-2024:

2. Penetapan Target Kegiatan Utama RB General

Kegiatan utama menjadi acuan Setjen KPU dalam pelaksanaan RB. Penetapan target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* RB Nasional. Target kegiatan utama Setjen KPU dituangkan seperti tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS 1:
TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL

Tabel 12 Sasaran Strategis 1

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	Tersedianya kebijakan mekanisme kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi	N/A	-	1 Dokumen	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
S.2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	1. Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>)	N/A	-	1 Kebijakan	Biro SDM/ Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		2. Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja	N/A	1 Kebijakan	-	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
		3. Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan	N/A	-	1 Aplikasi	Biro SDM dan Pusdatin	Seluruh Unit Kerja

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN					
		4. Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	-	1 kebijakan	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
		5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
S.3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Lingkungan Setjen KPU	Indeks SPBE Baik	2,73	3,00	3,50	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
S.4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	68,15	70,00	72,00	Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat Utama	Seluruh Unit Kerja
S.5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital						

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan	2 layanan	6 layanan	2 layanan	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
S.6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	jumlah unit ZI/WBK/WBBM	9 Provinsi 139 Kab/Kota	10 Provinsi 200 Kab/Kota	12 Provinsi 300 Kab/Kota	Inspektorat Utama	Seluruh unit kerja
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3,00	3,40	3,60	Inspektorat Utama	Seluruh Unit Kerja
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat Baik	N/A	90%	90%	Inspektorat Utama	Seluruh Unit Kerja
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas	73,24	75	78	Inspektorat Utama	Seluruh Unit Kerja
S.7	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	-	70	Biro Perundang-Undangan/ Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Seluruh Unit Kerja

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	75,70	77	80	Biro Perundang – Undangan/ Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Seluruh Unit Kerja
S.8	Pelaksanaan Arsip Digital	1. Indeks Pengelolaan Arsip	61,13	65	70	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Aspek	N/A			Pusdatin	
		Indeks Domain	N/A				
		Indeks Pembangunan Statistik	N/A				
S.9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	28,60	50	70	Biro Logistik	Seluruh Unit Kerja
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,12	92,5	95		
		Indeks Pengelolaan Aset	3,00	3,27	3,5		

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		Capaian Akutabilitas Keuangan	Capaian Akutabilitas Keuangan (opini BPK)	WTP	WTP	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara/ Inspektorat Utama	

SASARAN STRATEGIS 2:
BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL

Tabel 13 Target Kegiatan Utama Sasaran Strategis 2

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.1	Penataan Jabatan Fungsional	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	N/A	1 dokumen	1 dokumen	Biro SDM	Seluruh unit kerja
S.2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Talenta ASN	N/A	-	1 dokumen	Biro SDM	Seluruh unit kerja
S.3	Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	25%	25%	25%	Puslatlitbang	Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Penanggung Jawab Output	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.6	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Kinerja Pegawai ASN	N/A	100%	100%	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
S.7	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	N/A	0,7	0,8	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
		Nilai Profesionalitas ASN					
	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlaq	N/A	75	80	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
	Pelaksanaan Pelayanan PublikPrima	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	92,40			Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja

3. Penetapan dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, Setjen KPU dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Dalam pelaksanaan RB tematik, Setjen KPU merupakan *non-implementing agency*, sehingga program RB tematik yang akan dilaksanakan diinisiasi secara mandiri berdasarkan tema yang ditetapkan oleh tingkat makro.

Terdapat 2 (dua) tema RB tematik yang menjadi fokus dalam pelaksanaan RB di Setjen KPU tahun ini, yaitu Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Kedua tema tersebut ditetapkan untuk menjadi fokus RB Setjen KPU tahun ini karena diarahkan untuk percepatan capaian agenda pembangunan nasional dan mendukung prioritas aktual presiden yang berfokus pada peningkatan PDN. Selain itu, Setjen KPU merupakan *non-implementing agency* yaitu Kementerian/ Lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro

Tabel 14 Penetapan Tema dan Target RB Tematik

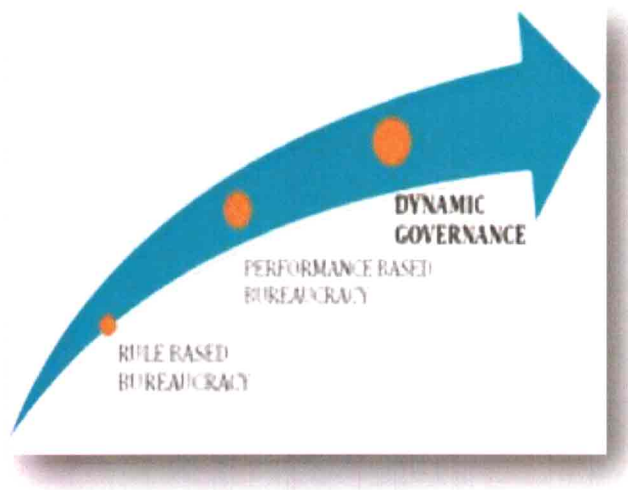
Tema	Sasaran Tematik	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target	
				2023	2024
Digitaliasi Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Berbasis Digital	percepatan dan kemudahan pelayanan publik melalui peningkatan <i>digital culture</i> (implementasi SPBE nasional/ penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi)	N/A	1 Aps	-
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Peningkatan TKDN	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.	N/A	70	75

BAB 4

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPU

A. Pelaksanaan RB Setjen KPU

RB bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran program RB. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam 5 (lima) tahun ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*.



Gambar 16 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Tujuan RB 2020-2024 ditetapkan berdasarkan kepada tujuan dan sasaran RB

Nasional dan baseline kondisi sekarang. Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RB Setjen KPU adalah menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien, melalui penguatan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Mengembangkan standar pelayanan dan menguatkan unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mewujudkan SDM aparatur yang berkarakter dan berkelas dunia dengan didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, program pelatihan dan pengembangan karakter (*character building*), serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran RB dirumuskan sebagai berikut; Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel; serta pelayanan publik yang prima. Melalui penyusunan *Road Map* yang memuat target *outcome*, agenda prioritas dan rencana aksi program dan kegiatan RB yang terintegrasi untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran RB, hasil area perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2020 menuju tujuan akhir RB 2025.

1. Rencana Aksi RB General

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menimbulkan konsekuensi atas *Road Map* atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen KPU Tahun 2020-2024 yang juga harus direvisi.

Secara prinsip terdapat empat perbedaan utama antara *Road Map* revisi dibanding sebelumnya, yaitu penajaman goal setting, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB.

Penyesuaian tersebut akan berdampak pada rencana aksi, pemantauan dan evaluasinya sehingga dapat menjadi *performance feedback* dalam pelaksanaan

RB. Penajaman *Road Map* ini bertujuan untuk: (1) mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB; (2) mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan (3) mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis. Penajaman tersebut dapat terlihat pada rencana aksi berikut ini:

Gambar 17 Tabel Rencana Aksi RB General

Kegiatan Utama			IKU		Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian (2023)				Target Penyelesaian (2024)				Penanggung Jawab Output	
										Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	Koordinator	Pelaksana
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel																					
S.1		Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi																			
S.1a	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	1.	Kebijakan mekanisme kerja penyederhanaan birokrasi	N/A	-	1 Dokumen	a. Pemetaan dan Analisis	jumlah	jumlah hasil pemetaan jabatan yang dapat disederhanakan	-	-	-	1	-	-	-	-	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja		
							b. Pengajuan usulan	jumlah	jumlah usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	-	1	-	-	-				
							c. Penetapan	jumlah	jumlah penetapan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	-	-	1	-	-				
S.2		Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan baik																			
S.2a	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai	1.	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi)	N/A	-	1 Kebijakan	a. Penyesuaian mekanisme kerja	%	persentase mekanisme kerja yang disesuaikan	-	-	-	-	1	-	-	-	Biro SDM/Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja		
							b. Penyesuaian Proses Bisnis	%	persentase proses bisnis disederhana	-	-	-	-	-	1	-	-				

	ASN		si squad model)					kan											
							c. Pemanfaatan SPBE	jumlah	jumlah unit kerja memanfaatkan SPBE	-	-	-	-	-	-	1	-		
		2	Tersedia nya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja	N/A	1 Kebijakan	-	penyusunan rancangan kebijakan	jumlah	rancangan kebijakan hari dan jam kerja	-	-	-	1	-	-	-	-	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
							penetapan		penetapan kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	-		
		3	Tersedia nya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	-	1 Aplikasi	analisis kebutuhan	jumlah	dokumen analisis kebutuhan	-	-	-	1	-	-	-	-	Biro SDM dan Pusdatin	Seluruh Unit Kerja

							Pembuatan	jumlah	rancangan aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-		
							ujicoba	jumlah	laporan ujicoba	-	-	-	-	-	1	-	-		
							implementasi	jumlah	kickoff penggunaan	-	-	-	-	-	-	-	1		
		4	Tersedia nya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	-	1 kebijakan	penyusunan rancangan kebijakan	jumlah	rancangan kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	-	Biro SDM	Sehuruh Unit Kerja
							penetapan	jumlah	kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	-		

		5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja	jumlah	kegiatan monev implementasi kebijakan sistem kerja	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
S.3		Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional																	
S.3 a	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Lingkungan KPU	1.	Indeks SPBE	2,73	3,00	3,50	a. Penyusunan Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022	jumlah	1. Kebijakan Arsitektur SPBE	-	-	1	-	-	-	-	-	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
								jumlah	2. Dokumen Arsitektur SPBE	-	-	-	1	-	-	-	-		

							b. Implementasi Arsitektur SPBE	jumlah	1. Dokumen Peta Rencana SPBE	-	-	-	-	1	-	-	-		Seluruh Unit Kerja
							c. Monitoring dan evaluasi dan implementasi kebijakan Arsitektur SPBE	jumlah	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE	-	-	-	1	-	-	-	1		Seluruh Unit Kerja
S.4		Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan AKIP																	
S.4 a	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	1.	Nilai SAKIP	68,15	70,00	72,00	1. Perencanaan Kinerja	jumlah	dokumen Perencanaan Kinerja (PK 2023 dan Renja 2024)	1	-	-	1	1	-	-	-	Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektora t Utama	Seluruh Unit Kerja
								Kegiatan	terlaksananya sosialisasi dan bimtek penyusunan Rencana Kinejra 2024	-	1	-	-	-	1	-	-		
							2. Pengukuran Kinerja	jumlah	terlaksananya pemantauan progress realisasi	1	1	1	1	1	1	1	1		

									anggaran dan capaian output kegiatan										
								jumlah	melakukan pemantauan laporan periodik tahapan pemilu	-	1	-	1	-	1	-	1		
							3. Pelaporan Kinerja	jumlah	Jumlah eselon II yang menyampaikan dokumen akuntabilitas kinerja melalui portal E-SAKIP review	-	-	48	-	-	-	52	-		
							4. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	jumlah	Jumlah satuan kerja yang dapat dievaluasi akuntabilitas kinerja oleh APIP	-	-	452 satker	-	-	-	452 satker	-		
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital																		
S.5a	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital		Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan	2 layanan	6 layanan	2 layanan	a. Tersedianya pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi dan dapat diakses publik; dan	jumlah	pelayanan publik berbasis TIK	2	2	2	-	2	-	-	-	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja

							b. Terintegrasi-nya sistem informasi pelayanan	%	persentase aplikasi pelayanan publik terintegrasi	-	-	-	6	-	-	-	2		
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan																		
S.6 a	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	1.	jumlah unit ZI/WBK/WBBM	9 Provinsi 139 Kab/Kota	10 Provinsi 200 Kab/Kota	12 Provinsi 300 Kab/Kota	1. Pencanaan ZI	jumlah	Terlaksananya sosialisasi ZI	-	-	1	-	-	-	1	-	Inspektora t Utama	Seluruh unit kerja
							2. Pembangunan unit kerja	jumlah	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan predikat WBK/WBBM	-	-	-	442 Provinsi dan Kab/Kota	-	-	-	442 Provinsi dan Kab/Kota		Seluruh unit kerja
							3. Penetapan unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	jumlah	Surat Keputusan pembentukan Tim	-	-	-	1	-	-	-	1		Seluruh unit kerja
							4. Pemantauan pembangunan ZI	jumlah	Jumlah unit kerja yang dipantau perkembangan ZI-nya	-	-	-	-	-	-	-	-		Seluruh unit kerja
S.6 b	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)		Skor SPIP	3,00	3,40	3,60	1. Penguatan implementasi manajemen risiko unit kerja	jumlah	Jumlah hasil pemetaan risiko dan permasalahan pengawasan unit kerja	-	-	-	1	-	-	-	1	Inspektora t Utama	Seluruh Unit Kerja

								%	Persentase unit kerja dengan tingkat manajemen risiko minimal Baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			
							2. Percepatan implementasi manajemen risiko unit kerja	jumlah	Jumlah inovasi mitigasi risiko KKN yang efektif	-	-	-	1	-	-	-	1		
							3. Peningkatan kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawasan Internal (APIP) dengan APH	jumlah	Jumlah MoU kerja sama pengawasan	-	-	-	1	-	-	-	1		
S.6 c	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat Baik	N/A	50%	100%	optimalisasi pemanfaatan hasil pengaduan masyarakat	%	persentase pengaduan yang di manfaatkan sebagai umpan balik	-	-	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Inspektora t Utama	Seluruh Unit Kerja
							penguatan SDM	%	persentase SDM mendapatkan pelatihan pengaduan masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Puslatlitbang	
							peningkatan partisipasi pemangku	%	persentase pemangku kepentingan berpartisipasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

							kepentingan		si pada proses pengaduan										
							penguatan kelembagaan	jumlah	jumlah SK tim pengaduan	-	-	-	-	1	-	-	-		
							kordinasi, pemantauan dan evaluasi	jumlah	jumlah kordinasi pemantauan dan evaluasi	-	-	-	1	-	-	-	1		
S.6 d	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi		Survei Penilaian Integritas	86,24	88	90	pencegahan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi	jumlah	kegiatan sosialisasi penggunaan anggaran	-	-	-	1	-	-	-	1	Inspektora t Utama	Seluruh Unit Kerja
							perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi	jumlah	kegiatan sosialisasi pencegahan anti korupsi	-	-	-	1	-	-	-	1		
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi																		
S.7 a	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	1	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	-	70	1. Pembentukan tim pelaksana penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	jumlah	SK Tim Pelaksana penilaian	-	-	1	-	-	-	-	-	Biro Perundang - Undangan / Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Seluruh Unit Kerja
							2. Penilaian Mandiri	jumlah	LKE IKK	-	-	-	1	-	-	-	-		

							3. Pelaksanaan paparan praktik pengelolaan kebijakan di instansi di hadapan dewan pertimbangan	kegiatan	Pemaparan	-	-	-	1	-	-	-	-		
S. 7 b	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	2	Indeks Reformasi Hukum	75,70	77	80	1. Memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian b. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	%	persentase produk hukum yang dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perundang-Undangan / Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Seluruh Unit Kerja

							2. Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	%	persentase produk perundangan berdasarkan hasil reuiu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
							3. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan a. Penataan database Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah	Jumlah kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum	-	-	-	-	-	-	-	1		
							4. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat dan daerah a. kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah	Diklat PUU	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Perundang-undangan/ Puslatlitbang	Seluruh Unit Kerja

							Perancang Peraturan Perundangan											
							b. Tingkat keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundangan dalam pengembangan Perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, <i>workshop</i> baik secara klasikal maupun nonklasikal											
S. 8		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral																
S. 8 a	Pelaksanaan Arsip Digital		1. Indeks Pengelolaan Arsip	61,13	65	70	Kebijakan kearsipan	jumlah	kebijakan pengelolaan arsip	-	-	1	-	-	-	-	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
							Pembinaan kearsipan	jumlah	kegiatan pembinaan kearsipan secara berkala	-	-	1	1	1	1	1		

							Pengelolaan arsip dinamis	jumlah	pengelolaan arsip dinamis	-	-	1	1	1	1	1	1		
							Sumberdaya kearsipan	jumlah	Diklat Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	1		
S.8 b	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral		1. Indeks Aspek	N/A			Pembentukan tim penilai internal	jumlah	SK Tim	-	-	1	-	-	-	1	-	Pusdatin	
			2. Indeks Domain	N/A			Melaksanakan Penilaian Mandiri	Jumlah	LKE EPSS	-	-	-	1	-	-	-	1		
			3. Indeks Pemban- gunan Statistik	N/A			Memberikan unpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian verifikasi	jumlah	Verifikasi LKE	-	-	-	1	-	-	-	1		
S.9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset																		
S.9 a	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Kualitas pengadaan barang dan jasa	28,60	70	75	1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b. E-Tendering (Tender/Seleksi/ Tender Cepat); c. E-Purchasing; Non-E-Tendering &	%	persentase penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik	Seluruh Unit Kerja

							Non-E-Purchasing; dan E-Kontrak.												
							2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	%	persentase pelaksana PBJ memiliki sertifikat PBJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik dan Puslatlitbang	
							3. Tingkat Kematangan Unit Keira Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	kegiatan	persiapan penilaian tingkat kematangan	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Logistik	
S.9b	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	Capaian Akuntabilitas Keuangan (opini BPK)	WTP	WTP	WTP	1. Sosialisasi perubahan ketentuan yang berpengaruh pada laporan keuangan	jumlah	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara/Inspektoriat Utama	
							2. Kordinasi dengan kemenkeu terkait penyusunan laporan keuangan	jumlah	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1		

						3. Peningkatan kualitas SDM keuangan	jumlah	Kegiatan/ Persentase ?	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara/ Puslatlitbang	
						4. Pemyediaan konsultasi bagi unit kerja terkait penggunaan akun, pengelolaan tagihan dan waktu tagihan	jumlah	kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1		
						5. Penyusunan risk control matriks pada transaksi utama unit kerja	jumlah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1		
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,12	92,5	95	1. Kualitas perencanaan anggaran	%	persentase perencanaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Keuangan dan BMN	Seluruh Unit Kerja
						2. Kualitas pelaksanaan anggaran	%	persentase pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

							3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	%	persentase hasil pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3	Indeks Pengelolaan Aset	3,00	3,27	3,5	1. Persiapan;	%	persentase persiapan	-	-	-	1	-	-	-	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
							2. Perhitungan indeks;	%	persentase perhitungan indeks	-	-	-	-	1	-	-		
	SS.2 Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional																	
S.1	Terwujudnya Fungsional	Percepatan	Transformasi	Jabatan														
S.1 a	Penataan Jabatan Fungsional		ASN Profesional	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1. Penyusunan kebijakan penataan JF	Jumlah	Jumlah kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
							2. Penyusunan petunjuk teknis JF PKP (Pasca PermenPAN RB no.1/2023)	Jumlah	Jumlah kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	1	
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien																	
S.2 a	Penguatan Manajemen Talenta ASN		Indeks Sistem Merit	N/A			1. Identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;	jumlah									Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
							2. Analisis kebutuhan talenta;	jumlah										
							3. Penetapan strategi akuisisi;	jumlah										
							4. Identifikasi, penilaian dan	jumlah										

							pemetaan talenta;													
							5. Penetapan kelompok rencana suksesi; dan	jumlah												
							6. Pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar instansi dan rencana penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus	jumlah												
S.3	Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN		Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	25%	25%	25%	1. Pemenuhan target jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan/orientasi dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	%	Target sebanyak 25% yang telah mengikuti pelatihan/orientasi	-	-	-	25%	-	-	-	25%	Puslatlitbang		
							2. Tersedianya Jurnal Kepemiluan	Jumlah	1 Jurnal TKPI yang diterbitkan tepat waktu	-	1	-	1	-	1	-	1			
							3. Tersedianya analisis kebijakan Kepemiluan	Jumlah	1 Analisis Kepemiluan	-	-	1	1	-	1	-	1			

							4. Tersedianya rancangan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN KPU	Jumlah	1 rancangan keputusan	-	-	-	1	-	2	-	-		
							5. Tersedianya Modul Pelatihan	Jumlah	1 Modul	-	1	-	-	-	8	-	-		
							1. Tersedianya Tata Kelola Puslatlitbang - Renstra - Proses Bisnis - SOP 6. Roadmap	Jumlah	1 renstra 1 proses bisnis 16 SOP 1 roadmap	-	-	-	19	-	-	-	-		
							7. Tersedianya rancangan design sistem informasi pengembangan kompetensi ASN	Jumlah sistem informasi	2 (sistem informasi pengelolaan pelatihan dan penyusunan analisis kebutuhan dan rencana program PK ASN KPU	-	-	-	2	-	2	-	-		
							8. Peningkatan program pelatihan yang terakreditasi	Jumlah sertifikasi	Sertifikat akreditasi program pelatihan yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	2		
S.6	Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja		Kinerja Pegawai ASN	N/A	100%	100%	1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;	jumlah	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja

							2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai	jumlah	kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	1		
							3. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai;	jumlah	kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	1		
							4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.	jumlah	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-		
S.7		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN																Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
S.7a	Penguatan Sistem Merit	1	Indeks Sistem Merit	N/A	0,7	0,8	1. Road Map Penerapan Sistem Merit pada masing-masing Instansi Pemerintah	jumlah	Roadmap sistem merit yang disusun dan di tetapkan	-	-	-	1	-	-	-	-	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja
							2. Pembentukan dan tugas tim penilai mandiri Sistem Merit	jumlah	SK Tim	-	-	-	-	1	-	-	-		

							pada Instansi Pemerintah													
							3. Penetapan penilaian tingkat penerapan Sistem Merit	jumlah	Surat usulan penetapan sistem merit	-	-	-	-	-	1	-	-			
							4. Pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan Sistem Merit pada masing- masing Instansi Pemerintah	jumlah	tindak lanjut rekomendasi	-	-	-	-	-	-	1	-			
							5. Pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah	jumlah kegiatan	evaluasi berkala	-	-	-	-	-	-	-	1			
S.7 b	Penguatan Core Values ASN	1	Indeks BerAkhlaq	N/A	75	80	1. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;	%	% konten	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	100 %	100 %	10 0 %	100 %	Biro SDM	Seluruh Unit Kerja	
							2. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani	%	% kegiatan	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	100 %	100 %	10 0 %	100 %			

							Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;												
							3. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, xbanner, dan lain-lain;	%	% konten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
							4. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;	jumlah	kegiatan	-	-	2	3	4	5	6	7		
							5. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;	jumlah	kegiatan	-	-	2	3	4	5	6	7		
							6. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi	jumlah	kegiatan	-	-	-	1	1	1	1	1		
S.7	Pelaksanaan		Kualitas Pelayanan	4,34	4,51	4,6	1. Menyusun Kebijakan	jumlah	Standar pelayanan,	-	-	1	-	-	-	1	-	Biro Perencana	Seluruh Unit

c	Pelayanan Publik Prima		Publik				Pelayanan;		Laporan FKP, MP dan SKM									an dan Organisasi	Kerja penyelenggara pelayanan Publik
							2. Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan;	jumlah	Waktu Pelayanan, Kode Etik, Motivasi, Penghargaan, Budaya Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	-	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayanan Publik
							3. Peningkatan Sarana dan Prasarana;	jumlah	Sarpras Umum dan Sarpras Khusus akses disabilitas	-	-	1	-	-	-	1	-	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayanan Publik
							4. Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);	jumlah	Pemutakhiran Data SIPP	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayanan Publik
							5. Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan;	jumlah	Pengelolaan media konsultasi, akuntabilitas, tindak lanjut pengaduan	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayanan Publik
							6. Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	jumlah	Penciptaan inovasi	-	-	-	1	-	-	-	1	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayanan

																			n Publik
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

2. Rencana Aksi RB Tematik

Setelah instansi pemerintah telah memiliki kerangka logis kinerja, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun aksi yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Aktivitas utama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah utama adalah dengan penetapan rencana aksi yang didasarkan pada *logical framework* yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan rencana aksi menjadi penting sebab rencana aksi akan memecah proses mencapai tujuan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan agar menjadi lebih jelas. Pada rencana aksi ini, akan tergambar dengan lebih jelas dari hulu ke hilir (keseluruhan proses bisnis) siapa mengerjakan apa dengan target waktu penyelesaian yang jelas pula. Pelaksanaan penyusunan dilakukan oleh koordinator program tematik bersama instansi terkait. Secara lengkap konten rencana aksi tematik dapat dilihat dari gambar format rencana aksi RB Tematik, yaitu: permasalahan, aksi perbaikan, *output*, indikator target waktu penyelesaian, instansi yang bertanggung jawab sebagai koordinator, dan pelaksana aksi perbaikan.

Dari 4 (empat) tema RB tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden), Setjen KPU mengambil 2 (dua) tema yaitu:

- 1) Digitaliasi administrasi pemerintahan;
- 2) Percepatan prioritas aktual presiden.

Rencana aksi RB tematik Setjen KPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

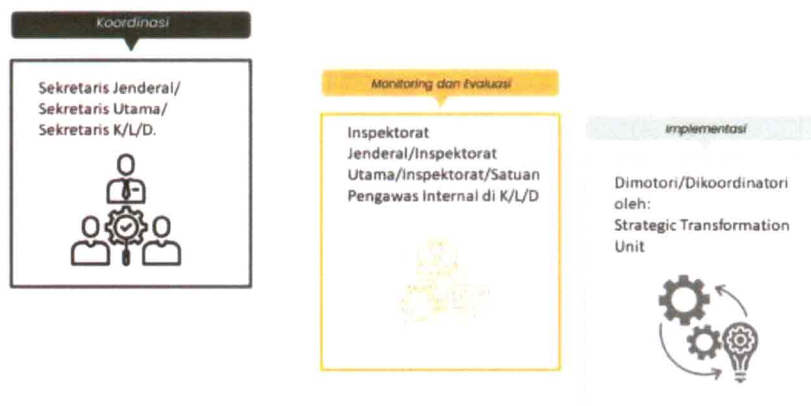
Gambar 18 Tabel Rencana Aksi RB Tematik

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
1	Masih banyaknya produk/bara-ng yang dibutuhkan sebagian atau seluruh komponen nya adalah barang impor	Meningkatnya/ tercapainya realisasi anggaran belanja barang/jasa minimal 40% menggunakan produk dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	70%	Pembentukan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah	SK Tim	-	-	-	1	Rencana kerja tim peningkatan produk dalam negeri	-	Biro Logistik	Unit Kerja Terkait
2	Masih terdapat kelambatan pelayanan terhadap stakeholder	Tersedianya layanan TIK pendukung	percepatan dan kemudahan pelayanan publik melalui peningkatan digital culture (implementasi SPBE nasional/ penggunaan aplikasi dalam	1 Aps	a. Asesmen kemandirian transform digital	Kegiatan	Tersedianya peta kematangan transformasi digital pada setiap unit kerja	-	-	1	-	Arsitektur SPBE	-	Pusdatin	Unit Kerja Terkait
					b. Pengembangan aplikasi pendukung	Jumlah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan menyesuaikan dengan	-	-	-	1		-		

Permasalahan		Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
			pelaksanaan tugas dan fungsi)				kebutuhan									

B. Pelaksana RB KPU

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.



Gambar 19 Pelaksana RB Level Mikro

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Pengelolaan pelaksanaan RB Setjen KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun ke depan akan berjalan sinergi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dikoordinasi oleh Inspektur Jenderal. Hasil evaluasi akan menitik-beratkan pada rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai masukan penajaman *Road Map* pada tahun setelahnya.

C. Strategi Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan RB General didasarkan pada perencanaan RB yang telah ditetapkan Tahapan ini merupakan hal strategis yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Adapun kunci

keberhasilan pelaksanaan RB General meliputi:

1. Komitmen Pimpinan

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (*commitment to change*) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan RB General. Dengan adanya komitmen kuat yang ditandai munculnya keterlibatan aktif dari pimpinan maupun seluruh jajaran, maka ide-ide luar biasa dan inovatif akan lebih mudah muncul. Saat ini baik pimpinan maupun jajaran dituntut semakin cepat tanggap agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju.

Komitmen dalam hal ini adalah berorientasi hasil dan fokus pada akar masalah; inovatif dan terbuka atas ide baru; pengalaman dan pengetahuan; adaptif dan memanfaatkan teknologi; mengedepankan *public value*; serta kolaboratif dan partisipatif.

2. Menyelesaikan akar masalah

Seringkali dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak berupaya mencari akar permasalahan, sehingga masalah yang sama muncul kembali. Dalam pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk diintervensi sesuai Rencana Aksi yang telah disusun.

3. Kolaborasi

Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja, maupun dengan *stakeholders* terkait. Pada satu sisi, permasalahan RB semakin kompleks, namun di sisi lain pemerintah memiliki berbagai keterbatasan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, isu strategis RB juga dapat berkolaborasi dengan berbagai unsur di luar pemerintah mulai dari swasta, akademisi, masyarakat, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan lain sebagainya.

4. Inovatif

Pelaksanaan RB yang semakin tinggiuntutannya perlu dilakukan

dengan cara-cara inovatif, tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis. K/L/D diharapkan dapat terbuka dengan hal-hal baru, berpikir ke depan dan *out of the box*.

5. Mengelola perubahan melalui agen perubahan dan *knowledge management*

Agar resistensi dapat dikurangi dan keberhasilan RB dapat dipercepat, maka dalam pengelolaan perubahan dapat dilakukan dengan strategi Agen Perubahan dan *Knowledge management* yang tepat. Agen perubahan merupakan perorangan/tim yang berperan sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi masukan alternatif solusi, dan penghubung komunikasi dalam proses pembangunan RB. Adapun penerapan *Knowledge management* diharapkan efektif meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi seluruh entitas internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan RB. Peran Agen Perubahan diantaranya:

- a. Memberikan kontribusi bagi Tim Pengelola RB Pusat maupun Tim Pengelola RB Unit dalam mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, dan menyusun rencana aksi;
- b. Menjadi *role model* bagi pegawai lain;
- c. Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja;
- d. Sebagai penggerak, perubahan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan;
- e. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi bagi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan;
- f. Sebagai mediator, memperlancar proses perubahan dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar instansi/unit kerja; dan
- g. Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan para pengambil keputusan.

D. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi RB KPU

Evaluasi di lingkungan KPU RI dan dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB

secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil *monitoring* yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan RB sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dan Rencana Aksi dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

BAB 5

PENUTUP

Setjen KPU secara terus menerus melakukan perubahan (reform) dan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian-capaian konkrit dalam delapan area perubahan RB serta capaian nilai RB Setjen KPU yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Potret 5 (lima) tahun lalu memiliki banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti penetapan program berbasis fungsi struktur yang ternyata membuat kesinambungan informasi RB yang kurang optimal, pergeseran kebijakan nasional terkait model evaluasi organisasi yang membuat struktur *Road Map* harus selalu dinamis, dan beberapa catatan yang akan memperbaiki kualitas perencanaan dan implementasi *Road Map* ke depan.

Pelaksanaan RB pada periode ketiga (2020-2024) ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Oleh karena itu dalam penyusunan *Road Map* Setjen KPU 2020-2024 dengan merujuk Dokumen Renstra Setjen KPU 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, sehingga dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Setjen KPU. Hal ini tercermin dengan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Setjen KPU menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward* and *punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Road Map RB Setjen KPU 2020-2024 mencakup pendekatan kombinasi baik dari pemetaan *baseline*, penetapan target yang ingin dicapai, dan penyusunan rencana aksi program dan kegiatannya. Pendekatan kombinasi ini dibuat untuk melengkapi untuk memperkaya khazanah *Road Map*.

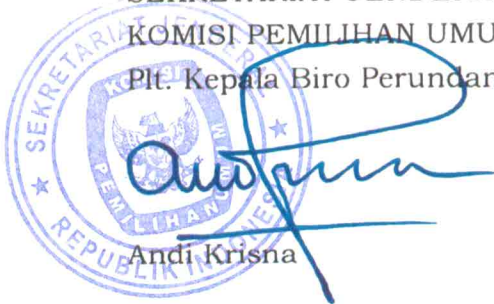
Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan RB Setjen KPU dapat mencapai kondisi *performance based bureaucracy* pada tahun 2024 dengan penguatan pengelolaan manajemen kinerja yang terintegrasi antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Juga dengan adanya penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024 diharapkan pelaksanaan RB lebih berdampak terhadap masyarakat dan *stakeholder* serta terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna